



# Partisipasi Masyarakat Dalam Program Perencanaan Pembangunan Kalurahan Petir (Studi Kasus Padukuhan Ngurak-Urak, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul)

Heri Roh Pujiati

Universitas Gunung Kidul

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat Padukuhan Ngurak-Urak dalam perencanaan pembangunan Kalurahan Petir, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengidentifikasi hambatan dan peluang peningkatan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi non-partisipatif dan wawancara semi-terstruktur terhadap perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berlangsung dalam berbagai bentuk, baik formal melalui Musyawarah Dusun dan Musyawarah Kalurahan, maupun informal melalui komunikasi langsung dengan perangkat desa. Namun, partisipasi masih bersifat konsultatif dan belum mencapai tingkat kemitraan. Faktor penghambat antara lain adalah migrasi tenaga kerja, terbatasnya akses informasi, serta minimnya keterlibatan pemuda dalam forum resmi. Meski demikian, terdapat indikasi positif berupa keterlibatan dalam kerja bakti, inisiatif Karang Taruna, serta penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah kalurahan. Kesimpulannya, partisipasi masyarakat di Padukuhan Ngurak-Urak menunjukkan tren positif, namun belum optimal secara substantif. Diperlukan strategi kelembagaan yang mendukung peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan ruang dialog yang inklusif, serta mekanisme pendanaan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan dan pemuda.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Desa, Kalurahan Petir, Konsultatif, Pemberdayaan Warga.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3021>

\*Correspondence: Heri Roh Pujiati

Email: [heripujiati6@gmail.com](mailto:heripujiati6@gmail.com)

Received: 12-04-2026

Accepted: 12-05-2026

Published: 12-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This research aims to describe the form of participation of the Padukuhan Ngurak-Urak community in planning the development of Petir District, analyze the factors that influence it, and identify obstacles and opportunities to increase participation. This research uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques through non-participatory observation and semi-structured interviews with village officials, community leaders and residents. The research results show that community participation occurs in various forms, both formally through the Hamlet Deliberation and Village Head Deliberation, as well as informally through direct communication with village officials. However, participation is still consultative and has not yet reached partnership level. Inhibiting factors include labor migration, limited access to information, and minimal youth involvement in official forums. However, there are positive indications in the form of involvement in community service work, Karang Taruna initiatives, as well as the use of information technology by the sub-district government. In conclusion, community participation in Padukuhan Ngurak-Urak shows a positive trend, but is not yet substantially optimal. Institutional strategies are needed that support increasing community capacity, providing space for inclusive dialogue, as well as funding mechanisms that are responsive to the needs of vulnerable groups and youth.

**Keywords:** Community Participation, Village Development Planning, Petir District, Consultative, Citizen Empowerment Is An

## Pendahuluan

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan serta berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa diposisikan sebagai subjek pembangunan yang otonom dan demokratis, sehingga menghendaki keterlibatan aktif warga dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi (Undang-Undang, 2014). Akan tetapi, di Kalurahan Petir, khususnya Padukuhan Ngurak-Urak, masih terdapat kesenjangan antara warga yang aktif terlibat dan mereka yang kurang berpartisipasi, ditambah dengan keterbatasan pemahaman serta kemampuan masyarakat dalam memberikan kontribusi maksimal pada forum musyawarah desa.

Kesenjangan yang terjadi tampak pada bentuk partisipasi masyarakat yang cenderung bersifat kuantitatif dan konsultatif, di mana warga hanya sebatas menyampaikan usulan tanpa memiliki posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan (Arnstein, 1969; Rosyida & Tonny Nasdian, 2011). Beberapa faktor penghambat di antaranya adalah tingginya migrasi tenaga kerja, keterbatasan akses terhadap informasi, serta kurangnya keterlibatan pemuda secara strategis dalam perencanaan pembangunan desa (Bihaming, 2019; Mustanir & Darmiah, 2016). Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan struktur kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sekaligus makna dari partisipasi masyarakat.

Penelitian sebelumnya (Gunanta Ginting dkk, 2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah baik namun terdapat kendala karena rendahnya kesadaran masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Penelitian (Jonathan Jacob Paul L, 2025) menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Desa Tegal Kertha telah dilakukan secara efektif, dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Hasilnya, masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat di Padukuhan Ngurak-Urak dalam perencanaan pembangunan Kalurahan Petir, termasuk faktor pengaruh, hambatan, dan potensi peningkatan partisipasi yang lebih bermakna dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga mengembangkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kapasitas warga dan mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang inklusif serta demokratis. Penelitian ini memberikan kontribusi utama berupa penyediaan data empiris yang lebih mendalam terkait dinamika partisipasi masyarakat di tingkat padukuhan, aspek yang sering kali kurang terangkat dalam kajian pembangunan desa di Indonesia, khususnya di kawasan Gunungkidul. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah desa, lembaga masyarakat, maupun kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan serta program pemberdayaan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan warga sekaligus memperkuat praktik tata kelola demokrasi desa (Moleong, 2005; Sugiyono, 2017).

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini memperkaya kajian literatur mengenai partisipasi masyarakat di tingkat lokal dengan menghadirkan studi kasus yang mendalam serta kontekstual secara sosial budaya. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman menyeluruh atas fenomena sosial sekaligus memberikan landasan empiris

bagi pembangunan desa berkelanjutan yang menempatkan pemberdayaan warga sebagai inti utamanya (Cohen & Uphoff, 1977; Mondong, 2013).

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat padukuhan. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna di balik tindakan sosial masyarakat serta relevan untuk menelaah konteks lokal secara utuh dan alami. Moleong (2011) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dalam kondisi nyata. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti menangkap realitas sosial secara fleksibel dan mendalam, terutama dalam situasi yang kompleks dan dinamis (Sugiyono, 2017).

Lokasi penelitian ditetapkan di Padukuhan Ngurak-urak, Kalurahan Petir, Kapanewon Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. Lokasi ini dipilih karena menunjukkan dinamika tingkat partisipasi warga dalam forum-forum musyawarah pembangunan kalurahan, serta memiliki karakteristik sosial yang mencerminkan situasi umum partisipasi masyarakat pedesaan. Waktu pelaksanaan penelitian adalah pada tanggal 16 hingga 17 Mei 2025, bertepatan dengan pelaksanaan tahapan perencanaan di tingkat kalurahan.

Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan fokus kajian (Etikan, 2016). Informan terdiri dari perangkat kalurahan (seperti Lurah dan Ulu-ulu), Dukuh, tokoh pemuda, serta warga yang aktif maupun kurang aktif dalam musyawarah pembangunan. Penentuan jumlah informan dilakukan hingga mencapai titik jenuh data (*data saturation*), yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi menghasilkan data baru yang signifikan (Moleong, 2005).

**Tabel 1.** Daftar Informan

Nama	Keterangan
Sarju	Lurah Kalurahan Petir
Ermasari	Ulu-Ulu Kalurahan Petir
Rusmiyanto	Dukuh Padukuhan Ngurak-Urak
Thola Fitrona	Ketua Karang Taruna Padukuhan Ngurak-Urak
Sonya Wawang Maya	Warga Padukuhan Ngurak-Urak
Karmin	Warga Padukuhan Ngurak-Urak
Suharmanto	Warga Padukuhan Ngurak-Urak
Riyanto	Warga Padukuhan Ngurak-Urak
Wunandi/Nardi	Warga Padukuhan Ngurak-Urak
Suwarna	Warga Padukuhan Ngurak-Urak

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu observasi non-partisipatif dan wawancara semi-terstruktur. Observasi dilakukan untuk mengamati

perilaku sosial, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah, serta dinamika interaksi antarwarga selama proses perencanaan berlangsung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangannya secara terbuka dan mendalam. Pertanyaan wawancara disusun berdasarkan indikator partisipasi dan disesuaikan dengan latar belakang informan untuk memperoleh informasi yang lebih kontekstual.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik untuk mempermudah identifikasi pola-pola keterlibatan masyarakat. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan merumuskan temuan utama berdasarkan hubungan antar kategori data yang telah dianalisis secara sistematis.

## Hasil dan Pembahasan

Partisipasi masyarakat di Padukuhan Ngurak-Urak dalam perencanaan pembangunan Kalurahan Petir menunjukkan dinamika yang cukup aktif meskipun tidak merata. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Padukuhan Ngurak-urak telah terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Kalurahan Petir melalui berbagai cara, seperti turut serta dalam forum musyawarah, mengemukakan aspirasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti untuk pengembangan lingkungan. Wawancara dengan Lurah Kalurahan Petir, Sarju, menunjukkan bahwa secara angka, keikutsertaan warga cukup tinggi. Ia mengungkapkan bahwa "partisipasi masyarakat sangat baik, karena setiap tahun banyak usulan yang terkumpul dan dimasukkan ke dalam RKP Kalurahan" (Sarju, 2025). Hal ini diperkuat oleh penemuan peneliti saat mengumpulkan data, yang melihat bahwa kegiatan musyawarah seperti Musdus dan Muskal masih berlangsung secara teratur, meskipun jumlah peserta tidak selalu ideal. Dalam konteks ini, partisipasi lebih tepat disebut sebagai partisipasi kuantitatif, yaitu partisipasi yang diukur berdasarkan banyaknya usulan dan kehadiran, bukan dari seberapa besar pengaruh masyarakat terhadap keputusan akhir.

Tahapan perencanaan di Kalurahan Petir telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa (Mendagri, 2014). Langkah-langkah tersebut meliputi rapat RT, Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Kalurahan (Muskal), serta pengumpulan usulan dan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP-Kal). Ulu-ulu Ermasari menjelaskan bahwa "muskal biasanya dijadwalkan antara bulan Juli dan Agustus, tergantung pada waktu masing-masing padukuhan" (Ermasari, 2025). Aparatur desa telah melaksanakan peran teknis ini dengan baik, namun keberhasilan proses tersebut tetap memerlukan kontribusi warga, terutama dalam pengajuan usulan yang substantif dan sesuai dengan kebutuhan setempat.

Tingkat kehadiran formal warga, seperti hadir dalam musyawarah dan memberikan pendapat, terlihat bervariasi di antara individu. Sonya Wawang Maya, Ketua RT 13, mengungkapkan bahwa ia aktif berpartisipasi dalam Muskal dan memberikan saran

berkaitan dengan pembangunan talud dan paving. "Saya hadir di muskal dan memberikan usulan, biasanya perangkat desa akan melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan," ujarnya (Sonya, 2025). Pengalaman serupa juga diungkapkan oleh Karmin dan Suharmanto yang mengaku selalu hadir apabila diundang. Sementara itu, Riyanto memiliki pengalaman yang berbeda. Meskipun ia tidak diundang secara resmi, ia tetap menyampaikan aspirasinya melalui dukuh. "Walaupun tidak diundang, saya tetap mengajukan usulan melalui Pak Dukuh," jelasnya (Riyanto, 2025). Ini menunjukkan bahwa partisipasi bisa saja bersifat informal, berlangsung lewat jalur komunikasi personal atau non-institusional.

Namun, ada beberapa hambatan yang jelas terlihat dalam kualitas partisipasi warga. Salah satu tantangan utama adalah migrasi tenaga kerja, di mana sejumlah warga yang berada dalam usia produktif keluar dari desa untuk bekerja, sehingga tidak dapat hadir dalam forum perencanaan secara langsung. Dukuh Rusmiyanto menjelaskan bahwa "kehadiran warga di musyawarah semakin berkurang, karena banyak yang merantau" (Rusmiyanto, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian Bihamding (2019) yang menyatakan bahwa migrasi dari desa ke kota berdampak buruk pada berkurangnya partisipasi langsung dalam forum desa (Bihamding, 2019). Di sisi lain, partisipasi dalam bentuk non-formal seperti kerja bakti atau kegiatan sosial masih cukup aktif, menunjukkan bahwa rasa kesadaran kolektif warga belum sepenuhnya hilang.

Partisipasi anak muda, khususnya yang bergabung dalam Karang Taruna, menunjukkan perkembangan yang unik. Thola Fitrona, selaku Ketua Karang Taruna, menyatakan bahwa organisasi tersebut telah beberapa kali mengajukan proposal kepada pemerintah kalurahan, seperti pelatihan keterampilan, perbaikan jalan, dan penyediaan sarana olahraga. Namun, tidak semua dari proposal tersebut dapat direalisasikan. "Kadang ada yang diterima, tetapi tidak seluruhnya bisa dianggarkan karena keterbatasan dana desa," ungkapnya (Thola, 2025). Di samping itu, Karang Taruna juga secara mandiri menjalankan program yang sepenuhnya diprakarsai oleh anak muda, seperti pembangunan lapangan voli dan bantuan pelatihan usaha kecil. Kegiatan ini didanai dengan cara swadaya atau lewat sponsor dari masyarakat setempat. Meskipun begitu, partisipasi anak muda dalam forum resmi masih tergolong rendah disebabkan beberapa faktor, seperti waktu yang terbatas, kurangnya pemahaman tentang kebijakan desa, dan sedikitnya kesempatan untuk menyampaikan ide secara langsung. Dukungan dari pemerintah kalurahan terhadap Karang Taruna dianggap masih belum maksimal. Pada beberapa kesempatan, Karang Taruna mendapatkan bantuan berupa dana operasional atau fasilitas balai dusun. Namun, tidak ada penganggaran yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Karang Taruna belum sepenuhnya dianggap sebagai mitra strategis dalam pembangunan. Kerja sama yang telah terbina dengan lembaga lain seperti PKK, TPK, dan Bamuskal lebih bersifat sementara dan belum terintegrasi dalam perencanaan pembangunan yang terstruktur.

Hasil studi lapangan memperlihatkan bahwa keterlibatan warga di Padukuhan Ngurak urak secara umum masih berada pada fase konsultasi menurut model tangga partisipasi Arnstein, 1969. Ini berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pendapat, namun kekuasaan mereka untuk memengaruhi keputusan

akhir masih sangat terbatas. Usulan dari masyarakat dicatat dan beberapa di antaranya diimplementasikan, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada kebijakan pemerintah kalurahan dan ketersediaan dana. Dalam hal ini, warga belum mencapai tingkatan kemitraan (*partnership*) yang memungkinkan mereka berperan penuh dalam menentukan arah pembangunan (Rosyida & Tonny Nasdian, 2011). Hal ini juga diungkapkan oleh Cohen dan Uphoff (1977), yang menyatakan bahwa partisipasi sejati memerlukan akses informasi, kemampuan teknis, serta mekanisme yang memungkinkan pengaruh nyata dari warga terhadap kebijakan (Mondong, 2013).

Proses perencanaan pembangunan di Kalurahan Petir, termasuk di Padukuhan Ngurak Urak, dilaksanakan secara partisipatif dan transparan. Pemerintah Kalurahan aktif melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil kegiatan pembangunan. Salah satu bentuk keterbukaan ini adalah pemasangan papan informasi di lokasi-lokasi strategis, sehingga warga dapat mengikuti dan memberikan masukan terhadap program-program yang direncanakan, baik yang berkaitan dengan pembangunan fisik, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, maupun penanggulangan bencana. Di Padukuhan Ngurak-Urak sendiri, proses perencanaan pembangunan infrastruktur dilakukan melalui musyawarah padukuhan yang kemudian ditindaklanjuti dalam Musyawarah Kalurahan (Musrenbangdesa). Contohnya, pembangunan jalan cor rabat beton sepanjang 109 meter di RT 14 merupakan hasil usulan masyarakat yang disepakati bersama. Proses ini juga melibatkan swadaya masyarakat, seperti pemberian lahan oleh warga untuk kepentingan umum. Setelah pembangunan selesai, jalan baru tersebut kini menjadi akses utama yang meningkatkan mobilitas dan kesejahteraan warga Padukuhan Ngurak-Urak.

Selain pembangunan fisik, perencanaan pembangunan di Padukuhan Ngurak-Urak juga menyentuh aspek sosial dan budaya. Pemerintah Kalurahan bersama lembaga masyarakat setempat menginisiasi program-program seperti pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan pengembangan ekonomi kreatif melalui sanggar seni. Seluruh proses ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat terlibat aktif dalam diskusi, pelatihan, hingga pelaksanaan kegiatan, sehingga hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keterlibatan pemuda menunjukkan adanya semangat kerjasama dan inisiatif sosial yang kuat, namun belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses perencanaan resmi. Rendahnya pemahaman tentang pembangunan di kalangan pemuda dan kurangnya ruang dialog terstruktur antara Karang Taruna dengan pemerintah desa menjadi faktor utama menurunnya partisipasi strategis. Keterlibatan generasi muda dalam pembangunan desa sangat bergantung pada ruang yang disediakan oleh pemerintah untuk mengekspresikan diri. Ketika tidak ada kebijakan yang secara khusus mendukung gagasan mereka, keterlibatan yang terjadi hanya terbatas pada tingkat operasional, bukan pada tahap perencanaan.

Masalah struktural lain, seperti migrasi penduduk, juga berkontribusi terhadap lemahnya partisipasi. Menurut Bihamding (2019), perpindahan penduduk dari desa ke kota secara langsung mengubah struktur sosial dan mengurangi jumlah aktor partisipatif di lingkungan lokal (Bihamding, 2019). Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan desa perlu disesuaikan dengan perubahan demografi, salah satunya dengan

memanfaatkan teknologi. Kalurahan Petir telah memulai langkah menuju e-governance dengan menggunakan media sosial dan papan informasi digital sebagai sarana komunikasi dua arah. Inisiatif ini sejalan dengan pandangan Adisasmita (2006) yang menyatakan bahwa pemerintahan desa yang modern harus mengadopsi inovasi digital untuk mempertahankan partisipasi masyarakat, termasuk mereka yang bermigrasi atau tidak bisa hadir langsung (Mustanir & Darmiah, 2016). Untuk meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dan pemuda, perlu ada langkah langkah kelembagaan yang nyata. Penelitian ini merekomendasikan tiga strategi utama. Pertama, perlu adanya penjadwalan musyawarah yang bersifat fleksibel, seperti di malam hari atau pada akhir pekan, sehingga warga yang bekerja tetap dapat berpartisipasi. Kedua, sangat penting untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi Karang Taruna dan kelompok rentan, agar partisipasi mereka tidak hanya simbolis tetapi juga strategis. Ketiga, perlu menyediakan ruang untuk mengekspresikan ide-ide, contohnya melalui program "Satu Pemuda Satu Gagasan" yang bisa dikembangkan menjadi sistem penyaluran usulan dari pemuda ke dalam dokumen RKP-Kal.

Masyarakat setempat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah mereka melalui berbagai mekanisme partisipatif, salah satunya adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat dusun, desa, hingga kecamatan. Dalam forum ini, warga diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi serta potensi lokal. Keterlibatan ini memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain melalui Musrenbang, masyarakat juga terlibat secara aktif dalam bentuk kontribusi ide, tenaga, bahkan dana atau material untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi ini tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga berlanjut pada pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek, melainkan subjek utama dalam proses pembangunan, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan yang telah dicapai. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan juga membawa manfaat lain seperti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mengurangi potensi konflik. Ketika warga dilibatkan sejak awal, mereka dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi permasalahan bersama, serta membangun konsensus yang kuat untuk mendukung keberhasilan program pembangunan. Selain itu, proses ini juga membangun kapasitas masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menumbuhkan kepemimpinan lokal yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Padukuhan Ngurak-urak dalam pembangunan Kalurahan Petir telah mengalami perkembangan yang positif, meskipun masih terbatas pada tingkat konsultasi. Kunci untuk memperkuat partisipasi terletak pada penguatan lembaga, inklusivitas dalam ruang musyawarah, dan keberanian pemerintah desa untuk memberikan kesempatan pengambilan keputusan yang lebih setara dan terbuka kepada masyarakat.

## Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kalurahan Petir, khususnya di Padukuhan Ngurak-Urak. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat telah terwujud dalam bentuk kehadiran pada forum-forum musyawarah, penyampaian usulan pembangunan secara formal maupun informal, serta keterlibatan dalam kegiatan swadaya dan kerja bakti. Namun, keterlibatan tersebut masih bersifat kuantitatif dan belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Tingkat partisipasi warga sebagian besar masih berada pada tahap konsultasi dalam model tangga partisipasi Arnstein. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi keputusan akhir tetap didominasi oleh pemerintah kalurahan. Faktor-faktor seperti migrasi tenaga kerja, terbatasnya akses informasi, serta kurangnya ruang dialog struktural antara pemerintah desa dengan kelompok strategis seperti pemuda menjadi hambatan utama dalam mewujudkan partisipasi yang lebih bermakna dan berkelanjutan.

Meski demikian, terdapat potensi penguatan partisipasi melalui inisiatif Karang Taruna, partisipasi swadaya, dan pemanfaatan media informasi digital oleh pemerintah kalurahan. Proses perencanaan pembangunan juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, meskipun dalam pelaksanaannya perlu diperkuat secara kelembagaan agar lebih inklusif. Partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur dan kegiatan sosial mencerminkan semangat kolektif yang masih terjaga, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan formal seperti RKP-Kal. Dengan demikian, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat memerlukan strategi penguatan kapasitas warga, fleksibilitas waktu musyawarah, serta penganggaran yang mendukung kelompok-kelompok rentan dan pemuda. Pembangunan yang berorientasi partisipasi sejati hanya dapat tercapai apabila terdapat komitmen bersama antara pemerintah kalurahan dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan.

## Referensi

- Agustin, Merry. (2015). "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrembang." *Jurnal Mahasiswa Unesa* 4(1):1-14.
- Akbar, Muh. Firyal, Srihandayani Suprpto, and Surati Surati. (2018). "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo." *Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi)* 6(2):135. doi: 10.31314/pjia.6.2.135-142.2017.
- Anisa Octaningrum, Annisa Risky Zuniati, Heny Nur Aulia (2025) *Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pintareng, Sulawesi Selatan : Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*  
<https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/228>

- Ariadi, A. (2023). Perencanaan Pembangunan. FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 21(1), 135–147. <https://doi.org/10.51826/fokus.v21i1.737>
- Bihamding, H. (2019). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa (Cetakan Pe). Indonesia: Deepublish Publisher. Retrieved from [file:///C:/Users/lenov/Downloads/Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa.pdf](file:///C:/Users/lenov/Downloads/Perencanaan%20Pembangunan%20Partisipatif%20Desa.pdf)
- Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Hakim, L. (2018, November). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA SUKAMERTA KECAMATAN RAWAMERTA KABUPATEN KARAWANG. JURNAL POLITIKOM INDONESIA, 2 (2).
- Hasanah, R. L., Mulyady, S., Azahra, S., Nuraeni, S., & Ridwan. (2024). PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 5 (8).
- <https://jurnal.uwp.ac.id> › [jisp](#) › [article](#) › [download](#)
- Ismail, T. (2015, 1 30). LANDASAN TEORI PEMBANGUNAN. Retrieved 1 30, 2015, from <https://repository.uin-suska.ac.id/4112/3/BAB%20II.pdf>
- Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 3(2), 186-190.
- Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 4(2), 225–238. Retrieved from <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>  
<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/issue/view/457>
- Magdalena Lenama (2021) PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN ( Studi Kasus di Desa Pengalangan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik) Universitas Wijaya Putra
- Mendagri. (2014). Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Retrieved June 25, 2024, from [https://www.academia.edu/116451176/Lexy\\_J\\_Moleong\\_2001\\_Metodologi\\_Penelitian\\_Kualitatif\\_Bandung\\_Remaja](https://www.academia.edu/116451176/Lexy_J_Moleong_2001_Metodologi_Penelitian_Kualitatif_Bandung_Remaja)

- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Governance*, 5(1), 1–18.
- Muhammad Hasan, M. A. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat; Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal. Retrieved from [https://eprints.unm.ac.id/9409/1/Buku\\_pembangunan\\_ekonomi\\_contoh\\_fix.pdf](https://eprints.unm.ac.id/9409/1/Buku_pembangunan_ekonomi_contoh_fix.pdf)
- Mustanir, A., & Darmiah, D. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu
- Nugroho, 2015. Mengenal Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan [https://konsultankti.wordpress.com/2015/05/18/mengenal-partisipasimasyarakat-dalam-pembangunan-sebuah-tinjauan-konsep/\(diakses\\_tanggal\\_09\\_September\\_pukul\\_20.45\)](https://konsultankti.wordpress.com/2015/05/18/mengenal-partisipasimasyarakat-dalam-pembangunan-sebuah-tinjauan-konsep/(diakses_tanggal_09_September_pukul_20.45)).
- Nurkatamso, Agus. 2013. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Fisik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Di Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Skripsi S1. Fakultas Geografi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Riskayanti dkk., "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa" yang diterbitkan JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS
- Rosyida, I., & Tonny Nasdian, F. (2011). Partisipasi Masyarakat Dan Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(1), 51–70. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i1.5832>
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
- Suroso, H., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *WACANA, Jurnal Sosial dan Humaniora*, 17(1), 7-15.
- Undang-Undang. (2014). Undang Undang No.06 Tahun 2014. ACM International Conference Proceeding Series, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. (2015). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).